

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pergeseran sistem Pendidikan Luar Biasa (PLB) dari sistem yang segregatif menuju sistem yang lebih integratif tidak dapat dilawan, karena didukung oleh alasan-alasan empiris dan didorong oleh dinamika filosofis, seperti Hak Azasi Manusia atas pendidikan. Perkembangan berpikir manusia yang semakin maju telah mampu merubah sikap dan cara memandang persoalan yang dihadapinya khususnya persoalan Pendidikan Luar Biasa.

Persoalan PLB saat ini tidak lagi mengelompokkan Anak Luar Biasa (ALB) berdasarkan ketunaannya, tetapi mereka dilihat atas dasar kebutuhan dan hambatan belajarnya. Cara pandang seperti ini memberi konsekwensi terhadap perubahan istilah yang digunakan dalam menggambarkan subyek didik.

Pandangan lama menggunakan istilah ALB yang diambil dari istilah Exceptional Child mengindikasikan bahwa pendidikan mereka dilayani di sekolah-sekolah luar biasa (SLB). Sementara dalam pandangan baru, istilah yang digunakan adalah anak yang mempunyai kebutuhan khusus (Children with Special Needs). Istilah ini muncul karena adanya beberapa keberatan atas penggunaan label dan klasifikasi ALB. Keberatan tersebut di antaranya dikemukakan oleh Marozas dan May (1988:164) bahwa *“label mengakibatkan stigma, stereotipe, dan sikap curiga terhadap ALB, dan berpengaruh negatif pada harga diri dan prestasi belajarnya ...”* Istilah Children with Special Needs telah

berhasil membebaskan anak dari label atau stigma kecacatan dan lebih menggambarkan kebutuhannya. Oleh karena itu, layanan pendidikan bagi mereka dilakukan di sekolah-sekolah biasa bersama-sama dengan anak-anak pada umumnya. Dengan perkataan lain, pendidikan bagi mereka dilayani di sekolah-sekolah biasa secara inklusif.

Sebagai pembaharuan dalam sistem pendidikan, program pendidikan yang inklusif masih dirasakan asing dan kurang familier. Kondisi seperti ini akan menimbulkan berbagai masalah dalam proses pelaksanaan pendidikan tersebut. Supriadi (1997:28) mengemukakan bahwa: *“Dalam suatu sistem pendidikan baik dalam lingkup makro atau mikro, ada tiga layanan yang diberikan kepada peserta didik yakni layanan administratif, pengajaran, serta bimbingan dan konseling. Ketiga layanan itu secara terpadu diarahkan guna mencapai tujuan pendidikan.* Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan, diperlukan pengintegrasian berbagai kegiatan atau usaha, salah satunya adalah kegiatan bimbingan. Selanjutnya diungkapkan bahwa:

Jika pengajaran (intruaction) yang tampak paling dominan membekali siswa dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, maka fungsi bimbingan dan konseling adalah memfasilitasi siswa agar PBM yang diikutinya berjalan lancar. Kendala-kendala psikologis dan nonpsikologis sedapat mungkin dapat ditekan. Dengan demikian, siswa dapat belajar dengan baik dan mencapai hasil yang baik pula.

Dalam PP Nomor 72 Tahun 1991 Bab XII Pasal 28 Ayat 1 dinyatakan bahwa :*“Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengatasi masalah yang disebabkan*

*oleh kelainan yang disandang, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan”.*

Dari pernyataan ini tampak jelas bahwa layanan bimbingan memegang peranan penting dalam mempersiapkan siswa menghadapi masa depannya. Di pihak lain, guru sebagai pengelola inti dalam proses belajar mengajar (PBM) mempunyai tugas untuk melaksanakan layanan bimbingan di sekolahnya, terlepas dari ada atau tidak ada petugas khusus yang disiapkan untuk itu. Peran guru sebagai pembimbing semakin diperkokoh posisinya selaku fasilitator dalam mencapai perkembangan siswa secara optimal. Hal ini selaras dengan tugas pokok guru yang tercantum dalam PP Nomor: 84/P/1993 Bab II pasal 3 tentang Tugas – tugas Pokok Guru yaitu :

Menyusun program pengajaran, menyajikan program pengajaran, evaluasi belajar, analisis hasil evaluasi belajar, serta menyusun program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya; atau menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, evaluasi pelaksanaan bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan, dan tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya.

Dari uraian di atas, jelas bahwa guru di sekolah dasar khususnya, di samping merupakan petugas inti pengelola peristiwa belajar mengajar dan pemelancar belajar siswa, juga memegang peranan kunci dan menjadi suatu keharusan bagi guru tersebut untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan bimbingan khususnya dalam proses pembelajarannya.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan guru di sekolah dasar, tidak dipersiapkan untuk menjadi seorang konselor terlebih konselor bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Dengan demikian, pengetahuan guru tentang Bimbingan dan konseling relatif sedikit. Demikian pula program yang khusus dirancang bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar belum tersedia, sementara siswa yang dihadapi guru sangat memerlukan layanan bimbingan secara khusus, sehingga setiap kebutuhan siswa dapat terpenuhi. Karena itu, guru dalam melaksanakan layanan bimbingan kepada anak berkebutuhan khusus perlu dipertanyakan.

Namun demikian, berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa sekolah dasar yang telah menghasilkan alumni anak berkebutuhan khusus dengan prestasi yang tidak kalah dengan prestasi teman-teman sebayanya. Misalnya: dua anak dari SD Gegerkalong Girang, seorang anak dari SD BPI, dan dua anak dari SD Al-Ghifari.

Dari fenomena di atas muncul permasalahan bagaimana guru memberikan layanan bimbingan dalam memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar, sehingga potensi mereka dapat berkembang secara optimal? Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu diadakan penelitian.

## **B. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Masalah yang dijadikan pusat pengamatan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan layanan bimbingan yang dilakukan guru dalam memenuhi

kebutuhan anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar, agar potensi mereka dapat berkembang secara optimal?. Dari rumusan masalah ini dapat dijabarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Apa yang dilakukan guru dalam menyusun program bimbingan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar dan mengapa demikian?
2. Apa yang dilakukan guru dalam memahami diri siswa mengenai kebutuhan siswa, kekuatan dan kelemahannya, serta kesulitan yang dihadapi dalam mengikuti PBM di Sekolah Dasar dan mengapa demikian?
3. Apa yang dilakukan guru dalam memberikan bantuan kepada siswa yang menghadapi kesulitan dalam PBM di Sekolah Dasar dan mengapa demikian?
4. Apa yang dilakukan guru dalam mengevaluasi pelaksanaan bimbingan bagi anak yang berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar dan mengapa demikian?
5. Apa yang dilakukan guru dalam melakukan analisis hasil pelaksanaan bimbingan bagi anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar dan mengapa demikian?
6. Apa yang dilakukan guru dalam menindaklanjuti program bimbingan yang telah dilaksanakan bagi anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar dan mengapa demikian?
7. Faktor-faktor apa yang menghambat guru dalam melaksanakan bimbingan selama PBM di Sekolah Dasar dan mengapa menjadi penghambat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menghasilkan program Bimbingan dan Konseling bagi anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar. Untuk itu, diperlukan gambaran yang mendalam tentang pelaksanaan bimbingan dalam PBM pada anak berkebutuhan khusus di SD. Dengan demikian, tujuan tersebut dirinci untuk mengungkap hal-hal yang dilakukan guru dalam:

1. Membuat perencanaan program bimbingan bagi anak yang berkebutuhan khusus di sekolah dasar.
2. Memahami diri anak berkebutuhan khusus mengenai : kebutuhan, kekuatan dan kelemahannya, serta kesulitan yang dihadapi dalam PBM di sekolah dasar.
3. Memberikan bantuan kepada anak berkebutuhan khusus yang menghadapi kesulitan dalam proses belajar mengajar di sekolah dasar.
4. Mengevaluasi pelaksanaan bimbingan bagi anak yang berkebutuhan khusus di sekolah dasar.
5. Melakukan analisis hasil pelaksanaan bimbingan bagi anak yang berkebutuhan khusus di sekolah dasar.
6. Menindaklanjuti program bimbingan yang telah dilaksanakan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar.
7. Faktor-faktor yang menghambat guru dalam melaksanakan bimbingan selama PBM di sekolah dasar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan program Bimbingan dan Konseling bagi anak berkebutuhan khusus di SD yang sangat bermanfaat bagi peningkatan efektivitas pelaksanaan bimbingan bagi anak yang berkebutuhan khusus di sekolah.

Pengetahuan tentang pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh guru di SD akan memberikan landasan empiris bagi perencanaan peningkatan dalam memantapkan program bimbingan secara keseluruhan.

Ditemukannya kendala-kendala yang dihadapi guru dalam melaksanakan kegiatan bimbingan bagi anak berkebutuhan khusus akan memudahkan para perencana dalam mencari alternatif terbaik untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan bimbingan di sekolah.

#### **E. Definisi Operasional Permasalahan Penelitian**

Untuk memperjelas pemaknaan dari permasalahan penelitian dan menghindari kesalahan dalam penelitian ini, maka dirumuskan definisi operasional permasalahan sebagai berikut.

##### **1. Layanan Bimbingan**

Secara formal bimbingan dapat didefinisikan sebagaimana dikemukakan oleh Glanz (1964:5) bahwa *"Guidance may therefore be defined as the process of helping individuals to solve problems and to be free and responsible members of a world community within which they live"*.



Definisi tersebut dapat diartikan bahwa bimbingan merupakan proses bantuan terhadap individu dalam menyelesaikan masalahnya, sehingga mereka mampu menciptakan kehidupan yang berarti dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggungjawab di lingkungannya.

Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan, yang dimaksud bimbingan dalam penelitian ini adalah bantuan yang diberikan guru kepada anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar berupa tindakan-tindakan yang dilakukan guru yang meliputi: penyusunan program, pemahaman diri siswa, pemberian bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam PBM, pelaksanaan evaluasi, analisis dan tindak lanjut program bimbingan.

## **2. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)**

Lynch (1994:1) mendefinisikan anak yang membutuhkan pendidikan khusus sebagai berikut.

“Children with special educational needs as all those who permanently or temporarily during their school careers have need of special educational responses on the part of the teacher, the institution and/or the system by dint of their physical, mental or multiple impairment or emotional condition or for reasons of situational disadvantage”

Pernyataan di atas memberikan makna bahwa anak yang membutuhkan pendidikan khusus adalah anak yang secara permanen atau temporer selama jenjang sekolah mereka memerlukan penanganan pendidikan khusus dari pihak guru, institusi, dan/atau sistem sebagai akibat kelainan mereka baik secara fisik,



mental, atau gabungannya, atau kondisi emosi, atau karena alasan situasi yang kurang menguntungkan.

Pengertian anak berkebutuhan khusus dalam penelitian ini merujuk kepada pengertian yang dikemukakan dalam Kebijakan Direktorat Pendidikan Luar Biasa tentang Layanan Pendidikan Inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Nasichin, 2002:5) adalah mereka yang tergolong luar biasa, baik dalam arti berkelainan, lamban belajar, maupun yang berkesulitan belajar. Berkelainan diartikan sebagai anak yang mengalami kelainan fisik dan atau mental dan atau kelainan perilaku. Kelainan fisik, meliputi tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa. Kelainan mental meliputi anak tunagrahita ringan dan tunagrahita sedang. Sedangkan kelainan perilaku meliputi anak tunalaras (PP nomor 72 tahun 1991).

### **3. Sekolah Dasar**

Yang dimaksud dengan Sekolah Dasar dalam penelitian ini adalah Sekolah Dasar umum yang peserta didiknya terdiri dari anak-anak biasa dan anak-anak yang memerlukan pendidikan khusus yang dilaksanakan secara bersama-sama. Hal ini merujuk kepada keputusan Mendikbud nomor 002/U/1987 Pasal 1 ayat 1 yang menggunakan istilah Sekolah Terpadu yang diartikan sebagai model penyelenggaraan program pendidikan bagi anak berkelainan yang diselenggarakan bersama anak normal di lembaga pendidikan umum dengan menggunakan kurikulum yang berlaku di lembaga pendidikan yang bersangkutan.